

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Suksesi

Suksesi merujuk pada proses pergantian atau transisi kepemimpinan, baik dalam konteks organisasi, pemerintahan, atau institusi. Dalam konteks politik dan pemerintahan, suksesi kepemimpinan menggambarkan bagaimana kekuasaan atau jabatan kepemimpinan dialihkan dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lainnya. Suksesi ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti pemilihan umum, pelantikan, atau bahkan melalui pergantian yang tidak terencana (misalnya, akibat krisis atau ketidakstabilan).

Dalam konteks yang lebih luas, suksesi juga melibatkan elemen penting dalam memastikan kelangsungan dan stabilitas organisasi atau negara, sehingga transisi kekuasaan berlangsung dengan lancar dan tidak mengganggu kestabilan sosial maupun politik.

Berikut adalah beberapa teori yang menjelaskan tentang suksesi kepemimpinan:

1. Suksesi Dalam Kepemimpinan Organisasi

a. Teori Jalur Karier (Career Path Theory)

Teori ini berfokus pada proses perkembangan individu dalam suatu organisasi, termasuk jalur karier yang dilalui seseorang hingga mencapai

posisi kepemimpinan. Dalam hal ini, suksesi kepemimpinan terjadi melalui sistem yang lebih terstruktur, di mana pemimpin masa depan dipersiapkan melalui pengalaman dan pendidikan yang relevan. Teori ini mengemukakan bahwa pengganti pemimpin harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai agar dapat memimpin dengan efektif.⁹

b. Teori Kepemimpinan Kontingen (Contingency Theory of Leadership)

Teori ini menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi atau konteks tertentu. Dalam hal suksesi kepemimpinan, teori ini mengajukan bahwa pemimpin yang tepat dipilih berdasarkan kebutuhan situasi atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi atau negara. Pemimpin yang menggantikan harus memiliki keterampilan dan pendekatan yang sesuai dengan konteks perubahan yang terjadi.¹⁰

2. Suksesi Kepemimpinan dalam Konteks Politik

a. Teori Kepemimpinan Dinasti atau Monarki

Teori ini umumnya berlaku dalam sistem monarki atau negara yang masih mengutamakan kepemimpinan berdasarkan garis keturunan. Dalam teori ini, suksesi kepemimpinan biasanya terjadi secara turun-temurun, di mana anggota keluarga atau keturunan langsung dari pemimpin sebelumnya menggantikan posisi kepemimpinan. Meskipun begitu, dalam banyak kasus

⁹ David A. Thomas, *Career Path Theory and Leadership Development* (New York: McGraw-Hill Education, 2023), 65-67

¹⁰ Fred E. Fiedler, *Contingency Model of Leadership* (Boston: Pearson Education, 2022), 112-114.

modern, teori ini lebih banyak dikritik karena kurangnya kesempatan untuk pergantian kepemimpinan berdasarkan meritokrasi.¹¹

b. Suksesi Demokratis

Dalam konteks sistem demokrasi, suksesi kepemimpinan biasanya terjadi melalui mekanisme pemilihan umum. Teori ini menekankan pentingnya mekanisme demokratis dalam memastikan suksesi yang adil dan sah, di mana pemimpin yang terpilih adalah mereka yang mendapat dukungan mayoritas rakyat. Suksesi dalam sistem ini diatur untuk menghindari monopoli kekuasaan dan memastikan pergantian yang terjadi sesuai dengan prinsip keadilan dan legitimasi.¹²

c. Revolusioner

Dalam konteks perubahan radikal, suksesi kepemimpinan bisa terjadi melalui revolusi atau pergantian yang disebabkan oleh ketidakpuasan sosial, politik, atau ekonomi. Teori ini menggambarkan bagaimana perubahan besar dalam struktur sosial dan politik bisa mendorong suksesi kepemimpinan yang tidak biasa, di mana pemimpin baru yang muncul sering kali berasal dari gerakan rakyat atau kelompok oposisi.¹³

¹¹ Lusi Andriyani, "Politik Dinasti Atau Dinasti Politik?" *UMJ*, accessed November 14, 2024, [https://umj.ac.id/#8203::contentReference\[oaicite:2\]{index=2}](https://umj.ac.id/#8203::contentReference[oaicite:2]{index=2}).

¹² Muhammad Maulana Nazril, Muhammad Faishal Fadhlurrahman, Lingga Abi Rahman, dan Surya Sukti, "Suksesi Kepemimpinan Politik Di Negara Demokrasi: Mekanisme, Tantangan, Dan Implikasinya," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2024): 103-111, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.26>

¹³ See further in Jurno.id, "Revolusi: Transformasi Mendalam dalam Sejarah Manusia" (2023).

3. Suksesi dalam Perspektif Ibn Khaldun

Suksesi dalam perspektif Ibnu Khaldun, dalam karyanya yang monumental, *muqaddimah*, memberikan pandangan yang mendalam tentang dinamika kekuasaan dan pergantian kepemimpinan, atau yang kita kenal sebagai suksesi. Ia melihat suksesi bukan hanya sebagai sebuah peristiwa pergantian, melainkan sebagai sebuah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor:

a. Suksesi dalam Siklus Peradaban

Ibn Khaldun, dalam karyanya *Muqaddimah*, menjelaskan teori suksesi kepemimpinan dalam konteks siklus kehidupan peradaban. Ia mengemukakan bahwa setiap dinasti atau pemerintahan melalui tiga tahap utama: pendirian, kejayaan, dan kehancuran. Suksesi kepemimpinan dalam teori ini terjadi ketika kekuatan *ashabiyah* (solidaritas sosial) kelompok yang berkuasa mulai memudar. Pemimpin baru akan muncul ketika kelompok yang lebih kuat atau lebih solid dari segi sosial dan politik mengambil alih.¹⁴

b. Suksesi dan *Ashabiyah*

Dalam pandangan Ibn Khaldun, suksesi kepemimpinan terjadi ketika kelompok sosial yang memiliki *ashabiyah* yang kuat berhasil menggantikan kelompok yang lebih lemah. Dalam hal ini, keberhasilan pemimpin baru bergantung pada kemampuannya untuk menjaga solidaritas sosial dan melindungi keadilan dalam masyarakat. Pemimpin yang tidak dapat menjaga

¹⁴ Moch. Fahrurrozi, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah, Dan Imarah," *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Islamic Studies* 4, no. 12 (2008): 145.

ashabiyah akan mengalami kemunduran, yang membuka jalan bagi suksesi baru.¹⁵

c. Suksesi Agama

Suksesi Agama dalam Pandangan Ibnu Khaldun Ibnu Khaldun, dalam karyanya *Muqaddimah*, memberikan perhatian yang cukup besar pada peran agama dalam dinamika sosial dan politik. Ia melihat agama tidak hanya sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang sangat kuat, termasuk dalam konteks suksesi kepemimpinan.¹⁶

Peran Agama dalam Suksesi:

1. Legitimasi: Agama seringkali digunakan untuk melegitimasi kekuasaan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang dianggap memiliki mandat dari Tuhan akan lebih mudah mendapatkan dukungan rakyat.
2. Persatuan: Agama juga berperan dalam mempersatukan masyarakat. Ikatan keagamaan dapat menjadi dasar bagi terbentuknya asabiyyah (solidaritas sosial) yang kuat.
3. Konflik: Di sisi lain, perbedaan agama atau interpretasi agama dapat menjadi sumber konflik dan perpecahan. Ini dapat memicu persaingan perebutan kekuasaan.

Suksesi Agama dalam Siklus Peradaban:

¹⁵ Muh. Ilham, "Konsep 'Ashabiyah dalam Pemikiran Politik Ibnu Khaldun," *Jurnal Politik Profetik* 4, no. 1 (2016): 14, <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i1a1>.

¹⁶ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah: Sejarah Dunia* (Terj. Ahmadie Thoah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 159.

Ibnu Khaldun melihat sejarah peradaban sebagai siklus yang berulang. Dalam konteks agama, ia melihat bahwa agama yang awalnya menjadi kekuatan pemersatu bisa menjadi faktor yang menyebabkan kemunduran sebuah peradaban. Hal ini bisa terjadi karena:

1. Radikalisasi: Agama dapat mengalami radikalisasi, di mana ajaran-ajarannya diinterpretasikan secara sempit dan eksklusif. Hal ini dapat memicu konflik dan perpecahan.
2. Korupsi Agama: Agama dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik atau ekonomi. Hal ini dapat merusak citra agama dan mengurangi pengaruhnya dalam masyarakat.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang suksesi agama masih relevan hingga saat ini. Kita dapat melihat bagaimana agama masih sering digunakan sebagai alat politik, baik untuk mempersatukan maupun memecah belah masyarakat. Konflik-konflik berbasis agama masih menjadi tantangan besar bagi dunia saat ini.

Contoh Konkret:

1. Pergantian Kekuasaan di Negara-negara Islam: Banyak pergantian kekuasaan di negara-negara Islam yang melibatkan isu agama. Kelompok-kelompok yang mengklaim memiliki interpretasi agama yang benar seringkali bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.

2. Radikalisasi Agama: Munculnya kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama seringkali memicu kekerasan dan terorisme.

Suksesi agama adalah fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Pandangan Ibnu Khaldun tentang suksesi agama memberikan kita kerangka berpikir yang berguna untuk memahami dinamika sosial dan politik yang terjadi di dunia saat ini.

d. Keadilan dan kemakmuran

Suksesi Keadilan dan Kemakmuran dalam Pandangan Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun melihat keadilan dan kemakmuran sebagai dua pilar penting dalam sebuah peradaban. Ia berargumen bahwa keadilan adalah fondasi yang kokoh bagi sebuah negara, sedangkan kemakmuran adalah buah dari keadilan itu sendiri.¹⁷

Kaitan Suksesi dengan Keadilan dan Kemakmuran:

1. Siklus Peradaban: Ibnu Khaldun mengajarkan bahwa setiap peradaban mengalami siklus naik-turun. Ketika sebuah dinasti atau negara baru berdiri, biasanya diawali dengan semangat kebersamaan (*asabiyyah*) yang tinggi, pemimpin yang adil, dan kebijakan yang baik. Hal ini memicu pertumbuhan ekonomi dan

¹⁷ Abdullah Al-Ahsan, *Ibnu Khaldun dan Konsep Keadilan dalam Peradaban Islam* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2018), hlm. 57.

kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring waktu, asabiyyah bisa melemah, korupsi merajalela, dan keadilan terabaikan. Akibatnya, kemakmuran menurun dan memicu ketidakstabilan yang dapat menyebabkan pergantian kepemimpinan.

2. Peran Pemimpin: Pemimpin yang adil dan bijaksana akan selalu berusaha menegakkan keadilan dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pemimpin yang zalim dan korup akan merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan.
3. Keadilan sebagai Dasar Kemakmuran: Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keadilan adalah prasyarat mutlak bagi terwujudnya kemakmuran. Ketika keadilan ditegakkan, masyarakat akan merasa aman dan terlindungi, sehingga mereka akan lebih produktif dan inovatif.
4. Kemakmuran sebagai Penguat Keadilan: Kemakmuran juga dapat memperkuat keadilan. Ketika masyarakat sejahtera, mereka akan lebih mudah menerima perbedaan dan toleran terhadap kelompok minoritas.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang sukseki keadilan dan kemakmuran sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini. Banyak negara yang mengalami ketidakstabilan akibat ketimpangan sosial, korupsi, dan ketidakadilan. Pemimpin yang gagal menjaga keadilan dan kemakmuran akan menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan kekuasaannya.

Contoh Konkret:

1. Revolusi: Banyak revolusi yang terjadi karena ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang berkepanjangan. Rakyat yang merasa tertindas akan bangkit untuk menuntut perubahan.
2. Kejatuhan Dinasti: Banyak dinasti yang runtuh karena kegagalan dalam menegakkan keadilan dan menciptakan kemakmuran. Ketika rakyat menderita, mereka akan mencari pemimpin baru yang dianggap lebih mampu.

Suksesi keadilan dan kemakmuran merupakan siklus yang saling terkait. Keadilan adalah fondasi yang kokoh bagi sebuah peradaban, sedangkan kemakmuran adalah buah dari keadilan itu sendiri. Pemimpin yang bijaksana akan selalu berusaha menyeimbangkan keduanya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

4. Sistem Sosial dan Kepemimpinan

Dalam teori ini, suksesi kepemimpinan dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Pemimpin yang baru harus mampu mengintegrasikan berbagai elemen dalam sistem sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas. Teori ini melihat suksesi sebagai perubahan yang terjadi seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang berinteraksi dalam suatu sistem sosial.¹⁸

¹⁸ Sulthon Syahril, "Teori-Teori Kepemimpinan," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 4, no. 2 (2019): 125, diakses 13 November.

B. Pemikiran Kepemimpinan Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan sosiolog Arab, menawarkan perspektif yang sangat menarik tentang kepemimpinan. Ia melihat kepemimpinan tidak hanya sebagai sebuah posisi, tetapi juga sebagai sebuah tanggung jawab yang besar terhadap Masyarakat. Konsep kunci dalam pemikiran kepemimpinan Ibnu Khaldun:

a. Konsep Asabiyyah

Asabiyyah, atau solidaritas sosial, adalah salah satu konsep sentral dalam pemikiran Ibnu Khaldun, yang menjadi landasan bagi stabilitas dan kekuatan suatu pemerintahan. Dalam karya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa asabiyyah adalah kekuatan pengikat dalam masyarakat yang memberikan rasa persatuan, loyalitas, dan solidaritas kelompok. Ia melihat asabiyyah sebagai faktor kunci dalam pembentukan kekuasaan politik, terutama dalam masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan atau kesukuan yang kuat. Asabiyyah berfungsi sebagai mekanisme untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, membangun ketahanan sosial, dan mendukung pemerintahan.¹⁹

Menurut Ibnu Khaldun, asabiyyah mengarahkan kelompok atau suku untuk bersatu demi kepentingan bersama, sehingga memungkinkan mereka untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Namun, ia juga

¹⁹ Sulthon Syahril, 'Teori-Teori Kepemimpinan', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), h.1

mencatat bahwa seiring waktu, asabiyyah cenderung melemah ketika sebuah dinasti atau pemerintahan mencapai kemakmuran dan kekuasaan puncaknya. Saat pemimpin dan masyarakat mulai terjebak dalam kemewahan dan menjadi individualistis, solidaritas berkurang, dan pemerintahan tersebut pun mulai mengalami kemunduran

Dalam konteks kepemimpinan, asabiyyah bukan hanya berlaku pada hubungan antarkelompok, tetapi juga menekankan pentingnya tanggung jawab pemimpin untuk mempertahankan persatuan dan keadilan dalam masyarakat. Bagi Khaldun, pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan kolektif dan gagal mempertahankan asabiyyah akan menghadapi risiko fragmentasi dan hilangnya dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin ideal adalah mereka yang tidak hanya memiliki keterampilan politik, tetapi juga mampu memperkuat solidaritas dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya.

b. Imamah dan Keadilan

Dalam pemikiran kepemimpinan politik Ibnu Khaldun, Imamah (kepemimpinan atau imam besar) dan keadilan adalah konsep mendasar yang berkaitan erat dengan stabilitas sosial dan politik suatu negara. Menurut Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah, Imamah tidak hanya berfungsi sebagai posisi politik tetapi juga sebagai otoritas moral yang mengatur masyarakat. Kepemimpinan dalam konteks ini harus memiliki sifat moral yang luhur dan tanggung jawab sosial untuk menjaga kesejahteraan kolektif. Seorang pemimpin ideal (imam) harus mampu

memenuhi kebutuhan rakyatnya dan menegakkan hukum yang adil sebagai bagian dari tugasnya untuk menciptakan stabilitas sosial.²⁰

Keadilan dalam pandangan Ibnu Khaldun adalah pilar utama untuk mempertahankan kekuasaan dan mencapai ketertiban sosial. Ia berpendapat bahwa ketidakadilan akan merusak fondasi sosial dan menyebabkan keruntuhan negara. Keadilan dianggap sebagai prinsip fundamental dalam tata kelola karena tidak hanya menyatukan masyarakat, tetapi juga menjaga agar pemerintahan tidak kehilangan dukungan rakyatnya. Bagi Ibnu Khaldun, pemimpin yang tidak adil akan melemahkan *ashabiyyah* (solidaritas sosial) yang menjadi basis kekuasaan dan menyebabkan disintegrasi politik dan sosial

Dalam konteks kepemimpinan imamah dan keadilan, Ibnu Khaldun menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengatur masyarakat secara bijaksana, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan etika. Tanpa keadilan, kekuasaan dianggap tidak sah dan berpotensi memicu ketidakstabilan serta konflik internal. Teori ini sangat relevan dalam pemerintahan yang ingin mempertahankan kekuasaannya melalui kepercayaan publik dan ketertiban, di mana moralitas dan tanggung jawab adalah kunci bagi pemerintahan yang berkelanjutan dan harmonis.

²⁰ Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History*, diterjemahkan oleh Franz Rosenthal (Princeton University Press, 2015), h. 252

c. Dinamika Perubahan

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa setiap pemerintahan akan mengalami siklus kehidupan, mulai dari kemunculan, pertumbuhan, puncak kejayaan, hingga kemunduran. Oleh karena itu, pemimpin harus adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di Masyarakat.

Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menyatakan bahwa setiap pemerintahan mengalami siklus kehidupan yang terdiri dari empat tahap utama: kemunculan, pertumbuhan, puncak kejayaan, dan kemunduran. Siklus ini menunjukkan bahwa suatu dinasti atau pemerintahan tidak dapat bertahan secara stabil tanpa menghadapi perubahan, karena sifat kekuasaan dan kekuatan politik bersifat dinamis dan selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang ada.²¹

1. **Kemunculan:** Pada tahap ini, pemerintahan dibangun oleh sekelompok orang yang memiliki solidaritas sosial yang kuat (*asabiyyah*). Kelompok ini biasanya muncul dengan tekad dan semangat tinggi untuk menggantikan pemerintahan sebelumnya yang sudah melemah. Pemimpin pada fase ini sering kali karismatik dan mampu mempersatukan pengikutnya.
2. **Pertumbuhan:** Pada tahap ini, pemerintahan memperluas pengaruhnya dan mulai memperkuat struktur politik dan

²¹ Sudin Yamani, "Sejarah Perkembangan dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 4040.

administratifnya. Solidaritas sosial yang kuat tetap ada, dan pemimpin mampu menjalankan kebijakan yang efektif. Pengaruh kekuasaan tumbuh seiring dengan upaya pemimpin untuk mengukuhkan kontrol atas masyarakat.

3. **Puncak Kejayaan:** Pemerintahan mencapai puncaknya ketika stabilitas, kemakmuran, dan kekuasaan berada pada titik tertinggi. Namun, pada tahap ini, Ibnu Khaldun mencatat bahwa seringkali terjadi pergeseran nilai. Para pemimpin mulai menikmati kemewahan, kekayaan, dan kenyamanan, yang lambat laun melemahkan solidaritas sosial (*ashabiyyah*). Dalam tahap ini, pemerintah menjadi lebih berorientasi pada keuntungan pribadi, dan ikatan antara penguasa dan rakyat mulai melemah.
4. **Kemunduran dan Keruntuhan:** Setelah mencapai puncak, solidaritas sosial yang memudar menyebabkan kerentanan terhadap tantangan eksternal maupun internal. Kelemahan ini membuka jalan bagi ketidakpuasan, disintegrasi, dan akhirnya keruntuhan kekuasaan. Pada tahap ini, pemerintah tidak lagi responsif terhadap perubahan sosial, menjadi korup, dan kehilangan dukungan dari rakyatnya.

Ibnu Khaldun menganggap bahwa pemimpin yang efektif harus adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial dan politik yang terjadi di masyarakat untuk memperpanjang masa kejayaan pemerintahannya dan menghindari keruntuhan lebih dini. Adaptasi ini mencakup kemampuan

untuk menjaga solidaritas sosial, memahami kebutuhan rakyat, dan menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi dan perubahan yang terjadi

d. Agama

Agama memiliki peran penting dalam mempersatukan masyarakat dan memberikan legitimasi kepada pemimpin. Namun, Ibnu Khaldun juga melihat bahwa agama bisa dimanfaatkan oleh pemimpin untuk memperkuat kekuasaannya.

Ibnu Khaldun juga menekankan bahwa agama memainkan peranan penting dalam legitimasi kepemimpinan. Ia berargumen bahwa solidaritas yang dihasilkan oleh agama jauh lebih kuat dibandingkan dengan *asabiyyah* semata. Dalam konteks ini, pemimpin yang baik harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam pemerintahan untuk menjaga stabilitas sosial dan moral Masyarakat.

C. Era Kepemimpinan Reformasi di Indonesia

a. Konteks Reformasi

Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998, ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Perubahan ini membawa harapan baru bagi demokrasi, namun juga menghadirkan tantangan baru dalam kepemimpinan, seperti korupsi, ketidakadilan sosial, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemimpin. Era reformasi sebuah periode penting dalam sejarah politik dan sosial negara ini yang menandai berakhirnya 32 tahun kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden

Soeharto. Reformasi ini dipicu oleh berbagai faktor kompleks, termasuk krisis ekonomi Asia, tuntutan demokrasi, dan perlawanan masyarakat terhadap otoritarianisme.²²

Reformasi 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997, yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian ke Indonesia, menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini.²³

Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi ini dan semakin banyak desakan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya.²⁴

Pada tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan terjadi di Jakarta dan Solo sebagai bentuk protes rakyat terhadap pemerintahan yang ada. Kerusuhan ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya reformasi 1998. Selain itu, lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 juga menjadi titik balik terjadinya

²² Annisa, 'Sejarah Reformasi 1998, Tujuan Dan Dampaknya', *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2024 <<https://fahum.umsu.ac.id/sejarah-reformasi-1998-tujuan-dan-dampaknya/>> [accessed 15 November 2024].

²³ Leo Bisma, 'Latar Belakang Masa Reformasi Indonesia & Tujuannya', *Ruang Guru*, 2024 <<https://www.ruangguru.com/blog/mengenal-masa-reformasi-di-indonesia>> [accessed 15 November 2024].

²⁴ Widya Lestari Ningsih, 'Faktor Ekonomi Dan Politik Runtuhnya Pemerintahan Orde Baru', *Kompas.Com*, 2024 [accessed 15 November 2024].

reformasi. Soeharto mengundurkan diri setelah tekanan yang semakin besar dari masyarakat dan mahasiswa yang menuntut perubahan di negara ini.

Latar belakang terjadinya reformasi juga melibatkan ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi yang terjadi pada era Orde Baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di berbagai sektor, dan pemerintahan Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya krisis moneter, ketidakpuasan rakyat, dan penyelewengan dalam pemerintahan, gerakan reformasi pun muncul sebagai upaya untuk mengubah segala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru dan mencapai perubahan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, latar belakang terjadinya reformasi 1998 adalah krisis ekonomi, penyelewengan dalam pemerintahan, ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi, serta tekanan dan desakan dari masyarakat yang tidak puas dengan kondisi yang ada.

Tujuan utama Reformasi 1998 adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantinya dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.²⁵

²⁵ Wikipedia, 'Era Reformasi', *Wikipedia*, 2024 <https://id.wikipedia.org/wiki/Era_Reformasi> [accessed 15 November 2024].

Selain itu, Reformasi 1998 juga bertujuan untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang telah merajalela di negara ini. Masyarakat Indonesia ingin membangun sistem yang transparan dan akuntabel, di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting dalam Reformasi 1998. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara.

Era reformasi merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Dengan berakhirnya rezim Orde Baru, masyarakat berharap dapat membangun negara yang lebih demokratis, transparan, dan adil. Meskipun perjalanan menuju tujuan tersebut masih panjang dan penuh tantangan, reformasi telah membuka jalan bagi perubahan positif dalam kehidupan politik dan sosial di Indonesia.

b. Kepemimpinan Transformatif

Kepemimpinan di era reformasi membutuhkan pendekatan transformatif yang mampu menginspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pemimpin yang sukses diharapkan memiliki visi yang jelas serta mampu mengambil keputusan yang adil dan bijaksana.

Teori kepemimpinan ini pertama kali diperkenalkan oleh James MacGregor Burns pada tahun 1978 dan kemudian dikembangkan lebih

lanjut oleh Bernard Bass. Pemimpin transformatif memotivasi pengikut untuk mencapai lebih dari yang diharapkan dengan membangkitkan kesadaran moral dan etika serta menginspirasi mereka untuk mencapai tujuan bersama.²⁶

c. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Konsep *asabiyyah* dapat diterapkan untuk memahami dinamika dukungan masyarakat terhadap pemimpin, sementara keadilan menjadi landasan penting bagi legitimasi kekuasaan

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan wawasan baru bagi praktik kepemimpinan di Indonesia.

Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun tetap signifikan dalam konteks modern, terutama dalam bidang kepemimpinan, politik, dan sosiologi. Ibnu Khaldun (1332–1406), seorang sejarawan dan filsuf Muslim terkenal, dikenal dengan karya monumentalnya, *Muqaddimah*, yang membahas prinsip-prinsip peradaban, siklus sosial, dan kepemimpinan. Berikut adalah beberapa aspek relevansinya dengan dunia kontemporer:

1. Konsep *Asabiyyah* (Solidaritas Sosial)

²⁶ Komsiyah, I. (2016). Kepemimpinan transformatif perkembangan dan implementasinya pada lembaga pendidikan. *TA'ALLUM*, 04(02), h. 293–316

Asabiyyah merupakan solidaritas atau kohesi sosial yang menjadi dasar kuatnya suatu peradaban atau kelompok. Dalam konteks Indonesia era reformasi kepemimpinan yang efektif memerlukan kohesi sosial di tengah keberagaman. Solidaritas antar kelompok dapat memperkuat integrasi nasional. Konteks Reformasi Asabiyyah dapat menjadi fondasi untuk membangun kembali rasa kebersamaan di tengah krisis kepercayaan pasca-Orde Baru.

2. Siklus Kepemimpinan dan Kejatuhan Dinasti

Ibnu Khaldun menggambarkan siklus kebangkitan dan kejatuhan dinasti melalui tiga tahap:

1. Tahap Awal: Pemimpin yang kuat membangun dinasti dengan solidaritas sosial tinggi.
2. Tahap Pertengahan: Dinasti menikmati kemakmuran, tetapi mulai muncul tanda-tanda dekadensi.
3. Tahap Akhir: Kemerostan moral dan lemahnya kepemimpinan menyebabkan kejatuhan.

Relevansi dengan Indonesia Pemikiran ini mencerminkan dinamika politik Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Kepemimpinan reformasi harus belajar dari sejarah untuk menghindari pola kemunduran.

3. Pemimpin sebagai Agen Moral dan Etika

Ibnu Khaldun menekankan bahwa pemimpin harus memiliki integritas moral dan menjadi teladan bagi rakyatnya. Pemimpin yang korup akan mempercepat kehancuran suatu peradaban.

4. Keseimbangan antara Kekuasaan dan Masyarakat

Ibnu Khaldun menyatakan bahwa kekuasaan yang langgeng hanya dapat terjadi jika pemimpin mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan elite dan masyarakat luas.

5. Pendidikan dan Pembangunan Peradaban

Ibnu Khaldun juga menekankan pentingnya pendidikan dalam membangun masyarakat yang kuat. Peradaban yang maju ditentukan oleh kualitas pendidikannya.

